

ABSTRAK

Saat ini hak penyandang disabilitas belum sepenuhnya terpenuhi, salah satunya adalah hak politik seperti hak turut serta memilih dan atau dipilih dalam sebuah proses pembuatan kebijakan yang di implementasikan dalam pemilihan umum, seperti yang terjadi di Kabupaten Ciamis hanya sekitar 36% penyandang disabilitas yang ikut andil dalam pemilihan umum. Pemilu yang merupakan wujud nyata pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat seharusnya mampu memenuhi hak politik warga negaranya termasuk penyandang disabilitas.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kabupaten Ciamis yang dilakukan oleh Negara melalui Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis sebagai seperangkat sistem penyelenggara pemilihan umum. Penulis menggunakan konsep Hak Politik, dalam hal ini hak politik berupa hak memilih dalam pemilihan umum dan turut serta dalam sebuah proses pengambilan keputusan adalah satu hak mutlak warga negara termasuk penyandang disabilitas yang harus terpenuhi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara untuk memperoleh informasi.

Hasil penelitian menunjukkan berbagai upaya dilakukan KPU dan BAWASLU Kabupaten Ciamis sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilihan umum dalam menjaga hak pilih penyandang disabilitas, mengingat hak politik warga negara yang dalam hal ini memilih dan atau dipilih dalam sebuah pemilihan umum merupakan hak mutlak setiap individu termasuk penyandang disabilitas. Adapun upaya yang dilakukan KPU dan BAWASLU Kabupaten Ciamis beberapa diantaranya adalah TPS Akses yang dirancang untuk memudahkan penyandang disabilitas dalam melakukan pemilihan, dan program relawan demokrasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kepemiluan kepada masyarakat dan juga penyandang disabilitas. Upaya yang dilakukan KPU dan BAWASLU Kabupaten Ciamis ini menghasilkan tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas sekitar 36%, meskipun bukan angka yang cukup besar tetapi 36% partisipasi memilih penyandang disabilitas pada Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Ciamis merupakan angka tertinggi tingkat partisipasi memilih penyandang disabilitas di Jawa Barat.

Kata Kunci: Hak Politik, Pemilu, Disabilitas

ABSTRACT

Currently the rights of persons with disabilities have not been fully fulfilled, one of which is political rights such as the right to participate in voting and / or be elected in a policy-making process that is implemented in general elections, as happened in Ciamis Regency, only around 36% of people with disabilities take part in general election. Elections, which are the real form of government from the people, by the people and for the people, should be able to fulfill the political rights of citizens, including persons with disabilities.

The purpose of this research is to find out how the efforts to fulfill the political rights of persons with disabilities in the 2019 elections in Ciamis Regency are carried out by the State through the General Election Commission and the General Election Supervisory Board of Ciamis Regency as a set of general election management systems. The author uses the concept of political rights, in this case the political right in the form of the right to vote in general elections and participate in a decision-making process is an absolute right of citizens including persons with disabilities that must be fulfilled. The research method used is a qualitative research method with interview techniques to obtain information.

The results of the research show that various efforts have been made by the KPU and BAWASLU of Ciamis Regency as a unit of general election organizers in protecting the voting rights of persons with disabilities, considering that the political rights of citizens, in this case to vote and / or be elected in a general election, are the absolute right of every individual, including persons with disabilities. Some of the efforts made by the KPU and BAWASLU of Ciamis Regency include Access TPS which is designed to make it easier for persons with disabilities to conduct elections, and the volunteer democracy program which aims to provide an understanding of electoral matters to the community and also people with disabilities. The efforts made by the KPU and BAWASLU of Ciamis Regency resulted in a political participation rate of people with disabilities of around 36%, although not a large enough figure but 36% of the participation in electing persons with disabilities in the 2019 Concurrent Election in Ciamis Regency is the highest level of participation in electing persons with disabilities in West Java.

Keywords: Political Rights, Election, Disability